**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI TAHUN**

**2011-2018**

**I Kadek Denny Aryanta1**

**I Gusti Bagus Indrajaya2**

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: dennykoran70@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk miskin secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2011 – 2018, dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk miskin secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2011 – 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu selama 8 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengangguran, upah minimum, dan jumlah penduduk miskin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan upah minimum dan jumlah penduduk Miskin secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci**: tingkat pengangguan, upah minimum, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi

***ABSTRACT***

*The objectives of this study are (1) to determine and analyze the effect of the unemployment rate, minimum wage and number of poor people simultaneously on the economic growth of Bali Province in 2011 – 2018, and (2) to determine and analyze the effect of the unemployment rate, minimum wage and population poor partially to the economic growth of Bali Province in 2011 – 2018. The data used is secondary data. Observations made in this study were for 8 years. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the unemployment rate, minimum wage, and the number of poor people simultaneously had a significant effect on economic growth. The unemployment rate partially has no significant effect on economic growth. While the minimum wage and the number of poor people partially have a negative and significant effect on economic growth.*

***Keywords****: unemployment rate, minimum wage, number of poor people and economic growth*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keadaan perekonomian dan kemakmuran masyarakat baik dalam suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Laksmi Dewi, 2013). Adanya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.Berhasil atau tidaknya pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa indkator diantaranya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Murjana Yasa, 2017). Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekononi yang tinggi didalam perencnaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang tertentu selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah pelaku pembangunan nasional maupun regional bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan diikuti oleh tingkat keterampilan yang cukup. maka akan menjadi modal pembangunan yang cukup potensial (Sulistiawati, 2012).

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara tidak bisa dilepaskan dari gejolak ekonomi dunia. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi terbuka, jika terjadi gejolak pada ekonomi internasional akan memberikan imbas terhadap perekonomian suatu negara, termasuk pula wilayah yang lebih kecil. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Bali memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang bertfluktuasi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 berkisar 6 persen, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,57 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 6,35 persen. Namun perlu di sadari disini perlunya peran pemerintah serta masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Menurut Bank Indonesia (2016), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami perlambatan pada tahun 2012 hinggn 2016. Faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah tingkat pengangguran. Siregar dan Wahyuniarti (2007) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang menunjukan semakin banyak *output* nasional mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga seharusnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Muana Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Yaumidin (2011) mengatakan pengaruh negatif antara pertumbuhan dan pengangguran disebut sebagai "Hukum Okun". Secara umum Okun menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran adalah sekitar satu dari tiga. Penurunan dalam setiap satu persen tingkat pengangguran, dibutuhkan sekitar tiga persen peningkatan pertumbuhan riil PDB.

Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada. Indikator yang digunakan dalam mengukur jumlah pengangguran yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka digunakan sebagai indikator dalam melihat tingkat pengangguran karena tingkat pengangguran merupakan total dari seluruh angka pengangguran yang terjadi pada suatu daerah. Menurut (Sukirno, 2010: 330) pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja, sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Menurut catatan BPS di Bali, tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu berikutnya harus dinyatakan pada nilai riil artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan eknologi) yang berarti secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Upah dan gaji adalah pendapatan bagi pekerja. Maka dari itu unsur upah minimum diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

Faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran adalah Upah Minimum Regional. Upah minimum regional merupakan standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan kepada karyawan/ buruh/ pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum yang layak (KHL) yang berlaku di provinsi bersangkutan. Upah merupakan konpensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000:133). Penetapan UMR yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya jumlah pengangguran yang ada, dimana dapat berpengaruh positif ataupun negatif.

Aldino (2018) mengemukakan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efesiensi terhadap produksi dengan cara pengurangan tenaga kerja. Menurut (Dayuh, 2012) pada awal masa pembangunan sering disampaikan bahwa masyarakat miskin tidak dapat beradapt asi sehingga menyebabkan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*Necessary Condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan penduduk miskin. Adanya pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian di suatu daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendeketan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas kedimensi sosial, kesehatan, dan politik. kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah kemunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan. Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012). Seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa memenuhi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Yudha, 2013). Definisi orang tergolong miskin yaitu merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Saparuddin dkk. (2015) mengatakan persoalan dalam pembangunan yaitu bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin, karena selain alasan kemanusiaan, mengatasi masalah kemiskinan adalah salah satu usaha yang perlu dilakukan demi menghindari biaya pembangunan yang lebih besar di masa yang akan datang. Banyak teori, model, dan juga strategi pembangunan yang telah diutarakan oleh banyak ahli untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun masalah kemiskinan tetap saja menjadi masalah penting yang harus segera diatasi khususnya seperti yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang.

Kembar Sri Budhi (2013) berpendapat bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ditujukan melalui perkembangan PDRB, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan, dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan percepatan terhadap pengurangan kemiskinan, perlu untuk dipahami bagaimana percepatan pertumbuhan *nontradables* mempengaruhi pekerjaan dan upah bagi masyarakat miskin (Osmani, 2005).

Ketenagakerjaan dan kualitas pekerjaan yang layak sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan dan pertumbuhan yang mampu mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan dengan demikian proses di mana pertumbuhan output menginduksi peningkatan lapangan kerja produktif dan menguntungkan yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengurangan kemiskinan (Erns dan Jainne, 2009).

Upah minimum akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal terserbut dikarenakan semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka semakin tinggi gaji atau upah yang didapatkan oleh tenaga kerja sehingga tenaga kerja akan lebih produktif lagi mengasilkan output. Hal tersebut didukung oleh penelitian Dian dan Muhammad Ramadhan (2015) menyatakan upah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang yang sama dinyatakan oleh Izatun (2015) upah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan jika jumlah penduduk semakin tinggi dan diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka semakin banyak tenaga kerja yang bekerja dan semakin banyak output yang dihasilkan oleh suatu Negara dan hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). hal tersebut didukung oleh penelitian Iswara dkk., (2016), dan alghofari (2009:15) mengatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Menurut Simanjuntak (2015:181), pertumbuhan ekonomi diartikan “sebagai GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya”. Menurut Dayuh (2012) “pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang”. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Yuni dan Sudibia, 2015).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Suatu perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menujukan perubahan yang bersifat kuantitatif yang biasanya diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah pada satu tahun tertentu, baik milik warga di wilayah tersebut maupun orang diluar warga wilayah tersebut. PDRB pada dasarnya merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam periode tertentu (BPS Provinsi Bali, 2012:3)

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Untuk itu, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil (Todaro, 1985:219). Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menggurangi jumlah pengangguran. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output secara terus menerus pada periode waktu tertentu yang diukur melalui peningkatan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) dari satuan tahun dengan tahun sebelumnya.

Teori Siklus Bisnis Riil (*Real Business Cycle Theory*). Teori ini menjelaskan fluktuasi ekonomi (fluktuasi pertumbuhan ekonomi) disebabkan oleh perubahan teknologi produksi, dan dari sumber lainnya seperti gangguan-gangguan dari luar negeri (*international disturbance*), fluktuasi cuaca (*climate fluctuations*), dan bencana alam (*natural disasters*).

Teori Siklus Keynesian Baru (*New Keynesian Cyccle Theory*). Teori siklus Keynesian baru menekankan bahwa pada kenyataan tingkat upah (*money wage rates*) hari ini hasil negosiasi (tidak otomatis berubah/rigid) dari masa lalu, ini berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang mempengaruhi tingkat upah dan posisi SRAS (*short-run aggregate supply*). Fluktuasi jangka pendek timbul karena deviasi dari permintaan agregat dan penawaran agegat.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang di keluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Apabila tingkat konsumsi seseorang berada dibawah jumlah rata - rata konsumsi normal, dapat dikatakan termasuk dalam katagori miskin. Sedangkan menurut Nehen (2012:193), penduduk miskin adalah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau yang berada di bawah garis kemiskinan kurang dari US$ 1 paritas daya beli (PPP) per hari dalam dollar.

Badan Pusat Satatistik (BPS, 2014) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Menurut Widodo, dkk (2011), fokus utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Bila seseorang atau sekelompok orang yang tergolong miskin, mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan dengan mereka yang termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: l) akses untuk mendapatkan makanan yang layak, 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4) akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, 6) akses kepada leisure dan entertainment, dan 7) akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara tergantung pada 2 faktor utama yaitu: (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Bila Pendapatan nasional perkapita suatu negara sangat tinggi, namun distribusi pendapatanya tidak merata, maka tingkat kemiskinannya akan tetap parah. Demikian juga sebaliknya, bila pemerataan distribusi pendapatan suatu negara sangat baik, tetapi pendapatan nasionalnya sangat rendah, maka kemiskinan akan tetap ada bahkan semakin meluas (Todaro, 2006: 230).

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan disuatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup (Nugroho, 2012). Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitaspembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Menurut Pranata Yudha (2013) di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar, yang artinya upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Bappenas (2010), Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak.

Berdasarkan pembahasan upah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah merupakan satu imbalan yang merupakan suatu Imbalan yang berupa balas jasa didalam suatu produksi yang merupakan hak yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan yang telah melakukan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas jasa yang telah dilakukan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Muhammad Taufik (2014) mendefinisikan tingkat pengangguran adalah proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sedangkan menurut (Sukirno, 2006:13) mendefinisikan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Seseorang yang tidak dapat bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pegangguran.

Upah minimum akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal terserbut dikarenakan semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka semakin tinggi gaji atau upah yang didapatkan oleh tenaga kerja sehingga tenaga kerja akan lebih produktif lagi mengasilkan output. Sebaliknya jika upah minimum semakin rendah dan para pengusaha memberikan upah kepada tenaga kerja dibawah upah minimum maka akan menyebabkan tenaga kerja akan tidak produktif lagi bahkan keluar dari pekerjaannya tersebut sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1997).

Jumlah penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan jika jumlah penduduk semakin tinggi dan diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka semakin banyak tenaga kerja yang bekerja dan semakin banyak output yang dihasilkan oleh suatu Negara dan hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun sangat penting untuk diperhatikan lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga skill yang dimiliki oleh tenaga kerja. Jika dua hal tersebut tidak dimiliki maka peningkatan jumlah penduduk justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh banyaknya penggaguran (Mankiw 2003).

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian di lakukan di Provinsi Bali karena pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2011-2018 berfluktuatif dan cenderung menurun. Adapun faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali adalah jumlah penduduk miskin, upah minimum, dan tingkat pengangguran.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non partisipan. Merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung. Pengumpulan data dengan metode observasi dalam penelitian peneliti hanya mencatat, mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ada tanpa ikut berperan langsung didalam pencarian data dilapangan. Data diperoleh dari BPS Provinsi Bali (Renon).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Kerangka penelitian yang dapat dikembangkan berdasarkan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut tingkat pengangguran (X1), upah minimum (X2) jumlah penduduk miskin (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dapat diketehui dengan menggunakan teknik regeresi. Model regresi linier berganda ditunjukkan olein persamaan sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β 3X3 + ei……………………………………….. (1)

Keterangan:

Y = Pertumbuhan ekonomi

α = Konstanta

X1 = Tingkat Pengangguran

X2 = Upah minimum

X3 = Jumlah Penduduk Miskin

β1, β2, β3,  = Koefisien Regresi

ei = Eror

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin (X1), upah minimum (X2) tingkat pengangguran (X3) secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), menurut Gujarati (1997) digunakan teknik analisa regeresi linier berganda yang dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Model regresi linier berganda ditunjukkan olein persamaan sebagai berikut:

**Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e**

Keterangan:

Y = pertumbuhan ekonomi

a = Konstanta

X1 = tingkat pengangguran

X2 = upah minimum

X3 = jumlah penduduk miskin

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi

e = error

**Tabel 1.**

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | | **Unstandardized Coefficients** | | **Standardized Coefficients** | **t** | **Sig.** | **Collinearity Statistics** | |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** | **Tolerance** | **VIF** |
| 1 | (Constant) | 8.264 | .308 |  | 26.851 | .000 |  |  |
| x1 | .002 | .014 | .015 | .169 | .866 | .860 | 1.163 |
| x2 | -6.361 | .000 | -.504 | -5.674 | .000 | .907 | 1.103 |
| x3 | -.215 | .032 | -.624 | -6.720 | .000 | .832 | 1.202 |
| a. Dependent Variable: y | | | | | | | | |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y = 8.264 + 0.002 X1 - 6.361E-7X2 - 0.215 X3

Sig = (0,000) (0, 866) (0,000) (0,000)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai tingkat penganguran (X1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Upah minimum (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dan jumlah penduduk miskin (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor industri kreatif bidang kerajinan kayu di Indonesia.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi kedua variabel adalah variabel independen dan terikat yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal ((Ghozali, 2017). Alat analisis yang digunakan dalam tes ini adalah tes Kolmogrov-Smirnov digunakan untuk memberikan angka yang lebih rinci untuk mengkonfirmasi apakah normalitas terjadi atau tidak dari data yang digunakan. Normalitas terjadi ketika hasil tes Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2017)

**Tabel 2.**

**Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ***Unstandardized Residual*** |
| N | | 72 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .39390787 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .074 |
| Positive | .074 |
| Negative | -.056 |
| Test Statistic | | .074 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200c,d |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 2 tersebut menunjukan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai toleransi dan lawan-lawannya, dan (2) Variance Inflating Factor (VIF). Dua pengukuran ini menunjukkan masing-masing yang independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas VIF adalah 10 dan nilai toleransi adalah 0.1. Jika nilai VIF adalah 10 dan nilai toleransi adalah 0.1 maka terjadi multikolinieritas, model regresi bebas dari multikolinieritas jika nilai toleransi> 0,10 dan nilai F adalah antara 1 dan kurang 10 ((Ghozali, 2017). Adapun nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Model*** | | ***Collinearity Statistics*** | |
| ***Tolerance*** | ***VIF*** |
| 1 | (Constant) |  |  |
| Tingkat Pengangguran | .860 | 1.163 |
| Upah Minimum | .907 | 1.103 |
| Penduduk Miskin | .832 | 1.202 |
|  |  |  |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas ditunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10, begitu juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10. Hal ini berarti bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah dalam regresi linier terdapat korelasi antara residu pada periode saat ini (t) dengan residu pada periode sebelumnya (t-1). Untuk memenuhi kriteria, model regresi harus terbebas dari gejala autokorelasi. Menurut Kuncoro (2001:106) mengatakan autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

**Tabel 4.**

**Uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Model*** | ***R*** | ***R Square*** | ***Adjusted R Square*** | ***Std. Error of the Estimate*** | ***Durbin-Watson*** |
| 1 | .716a | .513 | .491 | .40250 | 1.887 |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4, Nilai Durbin Watson sebesar 1.887 lebih kecil dari 4-du yang sebesar 4 – 1.705 = 2.295. Oleh karena nilai du < dw < (4-du) yaitu 1,705 < 1,887 < 2.295, ini berarti pada model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Cara heterogenastisitas dapat digunakan dengan menggunakan uji scatter plot. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas digunakan scatter plot antara ZPRED dan SRESID. Jika titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y.

**Tabel 5.**

**Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .248 | .170 |  | 1.454 | .151 |
| x1 | .007 | .008 | .112 | .880 | .382 |
| x2 | -5.135 | .000 | -.103 | -.828 | .411 |
| x3 | .024 | .018 | .178 | 1.375 | .174 |
| a. Dependent Variable: Abs\_Res | | | | | | |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifkansi masing-masing variabel lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan ketiga model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

**Tabel 6.**

**Hasil Uji F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Model*** | | ***Sum of Squares*** | ***df*** | ***Mean Square*** | ***F*** | ***Sig.*** |
| 1 | Regression | 11.591 | 3 | 3.864 | 23.849 | .000b |
| Residual | 11.017 | 68 | .162 |  |  |
| Total | 22.608 | 71 |  |  |  |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 dimana nilai F diperoleh sebesar 23.849 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Berdasarkan kriteria diatas dimana nilai F lebih besar dibanding F table yaitu 3.13 yang artinya H0 ditolak yang berarti pengaruh signifikan secara serempak antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka dapat disimpulkan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Miskin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 7.**

**Hasil Uji T**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Model*** | | ***Unstandardized Coefficients*** | | ***Standardized Coefficients*** | ***t*** | ***Sig.*** | ***Collinearity Statistics*** | |
| ***B*** | ***Std. Error*** | ***Beta*** | ***Tolerance*** | ***VIF*** |
| 1 | (Constant) | 8.264 | .308 |  | 26.851 | .000 |  |  |
| x1 | .002 | .014 | .015 | .169 | .866 | .860 | 1.163 |
| x2 | -6.361 | .000 | -.504 | -5.674 | .000 | .907 | 1.103 |
| x3 | -.215 | .032 | -.624 | -6.720 | .000 | .832 | 1.202 |
| a. Dependent Variable: y | | | | | | | | |

*Sumber:* Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji t tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai thitung = 0.169 < ttabel -2,571 dan signifikansi 0,866 > 0,05, mengindikasikan bahwa H0 diterima. Hal ini mempunyai arti Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil uji t upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai thitung = -5.674 < ttabel -2,571 dan signifikansi 0,000 > 0,05, mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hal ini mempunyai arti Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa upah minimum yang rendah mampu memberikan respon pada penambahan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang tinggi berarti daya beli masyarakat yang sangat rendah karena ketidakmampuan dalam membeli barang, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji t jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai thitung = -6.720 < ttabel -2,571 dan signifikansi 0,000 > 0,05, mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hal ini mempunyai arti Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sesuai degan penelitian sebelumnya yaitu (Watanabe, 2013) kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hubungan negatif dan berpengaruh signifikan antara variabel Kemiskinan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Bali dan memiliki hasil ttest sebesar -6,548 < 1,297 (ttabel) maka H1 ditolak dan sebaliknya Ho diterima. Dengan demikian Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat menurut Kabupaten/Kota tahun 201-2016 di Provinsi Bali.

**SIMPULAN**

Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Maka tingkat pengangguran tidak ada pengaruh positif dan negatif. Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh upah minimum yang rendah mampu memberikan respon pada penambahan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang tinggi berarti daya beli masyarakat yang sangat rendah karena ketidak mampuan dalam membeli barang, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin maka semakin rendah pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran bahwa hendaknya pemerintah memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan dengan lebih memusatkan kepada perluasan kesempatan kerja melalui sosialisasi lowongan kerja secara merata dan mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial. Mulai dari bantuan secara langsung dalam bentuk tunai, perbaikan tempat tinggal hingga pemberdayaan ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah lebih mengutamakan sektor-sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah penduduk miskin seperti sektor pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan selaian dari variabel dalam penelitian ini seperti mata uang, devisa negara, jumlah investasi.

**REFERENSI**

Alcock., Pete. 2012. *Peverty and Social Exslusion. The Student’s Companion to* *Social Policy. Fourth Edition.*

Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta. Aldino Musyawwiri., dan Murat Ungor. 2018. An Overview of the ProximateDeterminants of Economic Growth in Indonesia Since 1960. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES). 34 (1). pp 55-95.

BAPPENAS. (2010). Laporan Pencapaian Tujuan pembangunan Milenium Indonesia 2010. BAPPENAS atau KPPN Bank Indonesia. 2016. Data Penelitian Kurs dan Inflasi. Surakarta. Situs [www.bi.go.i](http://www.bi.go.id/)d

Batubara, Dison M.H., & Saskara, Nyoman. (2015). Analisis Hubungan Ekspor, Impor, PDB dan Utang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan,* Vol 8. No.1.

BPS Provinsi bali 2012. Situs [https://bali.bps.go.i](https://bali.bps.go.id/)d/

Bank Dunia, World Bank. (2010). The World Bank Annual Report 2010. Situs web.Worldbank.org

Dewi, Laksmi. 2013. Pengaruh PAD, PMA, dan Inflasi Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2, No.11. 502-512.

Dayuh, Rimbawa Nyoman. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Khusus Provinsi Bali 2001-2011). *Jurnal Piramida*. 8(2). h76-84.

Erns, Christoph, Janine Berg, ILO. 2009. *The Role of Employment and Labour* *Markets in The Fight Agains Poverty.*

Hill, Hal. 1987. *Concentration In Indonesian Manufacturing. Bulletin of Indonesian Economic Studies.* 23(2) August 71-100

Iswara, Noppy Putu. Luh Gede Meydianawati. I Gusti Bagus indrajaya dan Made Adigorim. 2016 Analisis model TSLS. *E-Jurnal* 5(1)

Izatun Purnami .2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3(7) h 1-13

Kembar Sri Budhi. Made .2008. Mengelola Sumber Daya Manusia Menyongsong Millennium Deve1omen Goals (MDGS) .*Jurnal Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.* H 82-88

Maggi, Rio., & saraswati, Brigitta Dian. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia: *Model Demand Pull Inflation.* Junal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol.6, No.2.

Mankiw, N Gregory .2000. *Teori Makro Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Mankiw. N Gregory .2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Muhammad Taufik. Eny Rochaida dan Furiadi .2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur .Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 7(l) 1190-101

Muhammad Ramadhan. 2019. Analyzing Public Infrastructure And Economic Growth In Indonesia International .*Journal of Scientific & Technology Research* Vol 8

Nanga, Muana. 2005. *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan.* Edisi Kedua Jakarta: PT Raja Grafika Persada.

Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press

Nugroho. Widiatma. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi. Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf. Rata-rata Lama Sekolah. Pengeluaran Perkapita dan Jumlah penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Skripsi*. Sarjan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Surabaya.

Osmani. S R. 2005. The Impact of Globalization on Poverty In Bangladesh Policy Integration Departement National Policy Group. International Labour Ofice Geneva.*Working Paper*.No.65.

Pranata Yudha. Okta Ryan .2013. Pengaruh Penumbuhan Ekonomi. Upah Mmimum. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011 .*Skripsi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Pramana, Komang Amelia Sri., & Meydianawathi, Luh Gede. (2013). Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas IndonesiaKe Amerika Serikat. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 6(2), pp: 98-105.

Rosner, L. Peter. 2000. Indonesian’s Non-Oil Export Perfomance During The Economic Crisis: Distinguishing Price Trends From Quantity Trends. *Bulletin of Indonesian Economic Studies.* 36(2) August 61-95

Rosner, L. Peter Neil McCulloch. 2008. A Note On Rice Production, Consumion and Import Data In Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies.* 44(1) March 81-92

Siregar, Hermanto. Dwi Wahyuni.2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Instutut Pertnian Bogor.*

Sulistiawati. R. 2012. Pengnmh Investasi Terhadap Penumbuhan Ekonomi dan Pemerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyrakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan.* Vol 13. No l. 29-30.

Saparuddin M dan Selly Yolanda, Karuniana Dianta A Sebayang. 2015. The Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia Trikonomika Vol 14, No l.

Sukirno, Sadono. 2010. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.

Taufik dkk. (2014). Pengaruh Investasi DanEkspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 7(2), :90-101.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta: Erlangga

Todaro. Michael P .1985 *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang*. Buku I.Jakarta Akademika Presindo

Todaro. M dan Smith, S.C .2006. *Economic Development* (9thed). New York Addison- Wesley.

Tika H. Moh. Pabundu, 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan Pertama, PT. Bhumi Aksara, Jakarta. Tejo Birowo .201l. *Realilionship Between Gmemment Expenditure and Poverty Rate in Indonesia*

Wiagustini, dkk. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 10(2), 155-173.

Widodo, Prabowo.P,Dkk, 2011, Pemodelan Sistem Berorientasi ObyekDengan UML, Graha ilmu, Yogyakarta.

Yaumidin, Umi Karomah. 2011. Agregate Demand, Unemployment, and EmploymentPolicies in the Indonesia's Industrial Sector